



LAPORAN KINERJA

*Biro Hukum dan
Pengaduan Masyarakat*

2024





**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2025

Inspektur II,

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA, QIA

NIP.196811251993022001



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Endang Suryastuti, S.H., M.Si.

Ketua:

Dwi Frihartomo, S.H., M.H.

Wakil Ketua:

Erni Husniyati, S.H., M.H.

Sekretaris:

Reno Tria Krisnadi, A.Md

Anggota:

Budi Wuryanto, S.H.

Irna Gusvita Indrikasari, S.H.

Jacob Junian Endiartia, S.E., MM.

Leo Krissandy Theo Rimbun Marulak, S.H.

Anisa Rahmasari, S.H., M.H.

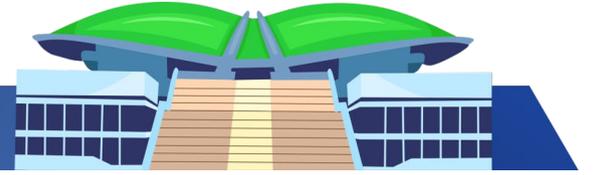
Ridha Khoirunnisa, S.I.P., M.A

Sekretariat:

Darwis, S.E.

Taufiq Hidayatullah, S.E.

Sri Dwastari

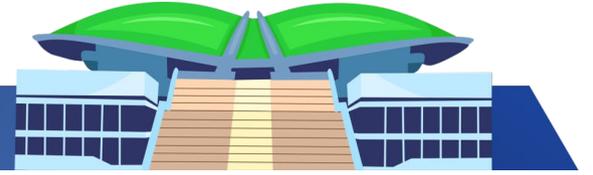


KATA PENGANTAR



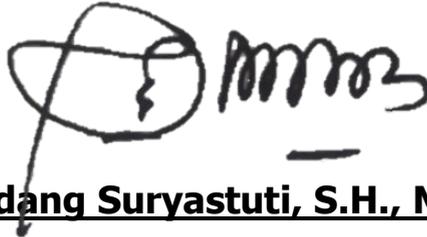
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu sarana Pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud pemenuhan budaya Ber-AKHLAK dalam hal akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran serta peningkatan kinerja berdasarkan capaian output yang telah dicapai di tahun 2024. Pencapaian terhadap sasaran kegiatan dalam Laporan kinerja tahun 2024 ini diharapkan mampu menggambarkan capaian Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dalam mendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.

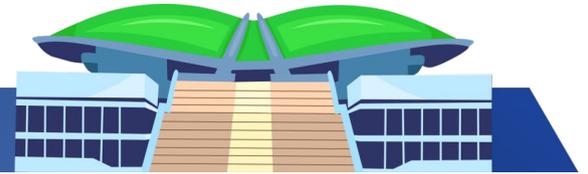


Terima Kasih Kami ucapkan Kepada semua pihak baik internal maupun eksternal Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat atas segala dukungan dan kerjasamanya sehingga seluruh kegiatan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, 31 Desember 2024
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat,

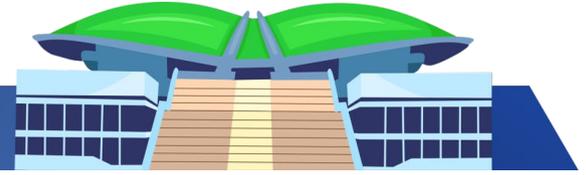


Endang Suryastuti, S.H., M.Si.



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	2
KATA PENGANTAR	3
EXECUTIVE SUMMARY	6
BAB I PENDAHULUAN	8
A. GAMBARAN UMUM	8
B. DASAR HUKUM	10
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI.....	11
D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024	18
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA.....	25
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	29
C. REALISASI ANGGARAN	42
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	48



EXECUTIVE SUMMARY

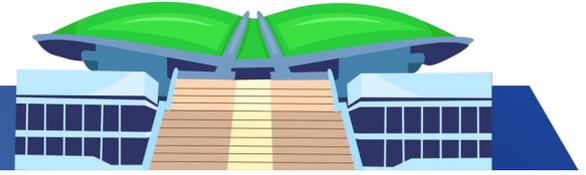
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Biro Hukum dan Dumas) merupakan unit kerja dibawah koordinasi Deputy Bidang Administrasi yang menunjang kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Biro Hukum dan Dumas mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.

Biro Hukum dan Dumas sebagai unit pimpinan pratama memiliki tujuan untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI. Bentuk dukungan Biro Hukum dan Dumas dimaksud tergambar dalam Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum;
2. Persentase capaian pembentukan produk hukum;
3. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
4. Nilai IKPA Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat :
 - a. Revisi DIPA (9,60);
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (19,20);
 - c. Penyerapan Anggaran (24,00);
 - d. Penyelesaian Tagihan (14,40);
 - e. Capaian Output (28,80); dan
5. Persentase Realisasi Anggaran.

Dalam mencapai target dalam Indikator Kinerja Utama, Biro Hukum dan Dumas menghadapi isu strategis yang dapat menjadi peluang maupun hambatan antara lain:

- a. Aplikasi SIDUMAS sebagai aplikasi khusus belum terintegrasi dengan SP4N LAPOR! sebagai aplikasi umum karena terkendala otorisasi dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi sebagai pengelola aplikasi. Belum terintegrasinya aplikasi ini membuat analisis pengaduan masyarakat bekerja pada dua aplikasi sehingga pengerjaan analisa pengaduan masyarakat belum berjalan dengan optimal. Selain itu penyempurnaan aplikasi SIDUMAS yang masih dalam tahap pengembangan guna menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan organisasi

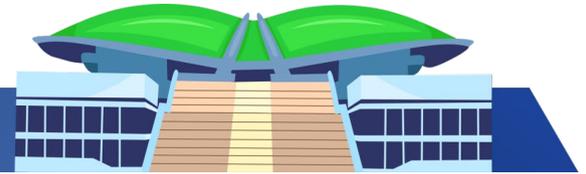


dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat.

- b. Dalam pembentukan produk hukum terdapat tantangan dalam menentukan prioritas yang merupakan kebutuhan yang mendesak, disharmoni substansi antara peraturan yang satu dengan yang lain, dan komitmen unit pengusul yang tidak sesuai dengan kerangka acuan yang disampaikan pada saat mengajukan usulan peraturan Sekjen DPR RI.
- c. Penanganan perkara hukum (gugatan) kepada DPR RI ataupun Setjen DPR RI, yang ditangani oleh Biro Hukum dan Dumas, sangat tergantung dengan jumlah perkara hukum yang diterima oleh DPR RI dan Setjen DPR RI, termasuk lokasi dimana perkara hukum (gugatan) tersebut diajukan. Selain itu, penyelesaian atas perkara hukum tersebut sangat tergantung dengan penyelesaian di ranah peradilan yang setiap perkara berbeda-beda waktu penyelesaiannya.

Selanjutnya dalam menghadapi isu strategis dimaksud, Biro Hukum dan Dumas pada tahun 2024 telah melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Menentukan prioritas kebutuhan pembentukan produk hukum dan mencegah disharmonisasi dengan adanya ketentuan identifikasi dan analisis, serta berusaha proaktif berkomunikasi kepada unit kerja untuk melanjutkan usulan prolegset yang tertunda
- b. Melakukan Evaluasi SK Prolegset dengan mengirimkan surat konfirmasi usulan ke unit pengusul.
- c. Realisasi Anggaran Satker Dewan tergantung pada perkara yang masuk ke DPR RI, namun dalam melaksanakan penanganan perkara, dilakukan upaya preventif yakni memastikan ketersediaan anggaran dan peningkatan kompetensi hukum.
- d. Melakukan Evaluasi atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No.22 Tahun 2022 tentang pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPR RI agar diganti dengan peraturan yang mengakomodir inovasi dalam optimalisasi analisa pengaduan masyarakat. Penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diharapkan menjadi inovasi dalam optimalisasi analisa pengaduan masyarakat menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang diberi nama "AIRA", serta diharapkan menjadi solusi efektivitas pengelolaan dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat oleh Sekretariat AKD.



BAB I

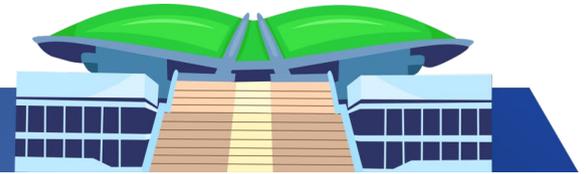
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Dumas) merupakan unit kerja di bawah koordinasi Deputi Bidang Administrasi yang menunjang kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Biro Hukum dan Dumas mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengelolaan pengaduan masyarakat dengan landasan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024, Biro Hukum dan Dumas terdiri dari 3 (tiga) unit kerja yaitu Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, dan Bagian Pengaduan Masyarakat.

Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI diharapkan mampu memberikan hasil capaian kinerja yang optimal dan profesional. Hal demikian diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu syarat terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

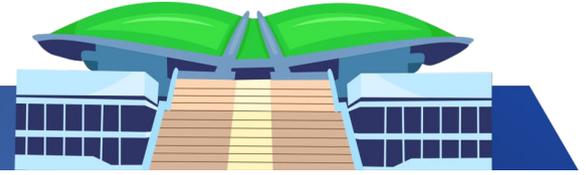


Untuk tercapainya tujuan tersebut, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan baik dan berkesinambungan yang dimulai dari sistem perencanaan dan program kegiatan, perencanaan anggaran hingga pelaksanaan program dan realisasi anggaran yang harus dikelola dengan baik dan benar, serta mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, sehingga berorientasi akhir kepada hasil (*result oriented*).

Dalam rangka mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah termasuk Setjen DPR RI perlu menyusun suatu Rencana Strategis yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka menengah (5 tahun) dan selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai Kontrak Kinerja serta pada akhirnya dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja pada setiap tahun berjalan.

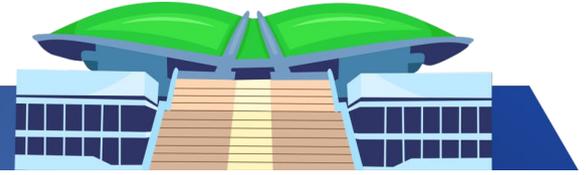
Laporan Kinerja Biro Hukum dan Dumas tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran sebagai bentuk kewajiban setiap instansi pemerintah yaitu berupa penggunaan seluruh sumber daya yang ada, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang terdapat di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang seluruhnya menggambarkan atau menjelaskan sejauh mana capaian kinerja yang dilakukan dalam satu tahun anggaran dengan mengacu kepada sasaran program kegiatan, indikator kinerja dan target yang ditetapkan, serta menjelaskan pula tingkat keberhasilan maupun kegagalan atas kinerja yang dicapai. Dengan demikian Laporan Kinerja selain dapat menjadi bahan evaluasi atas program yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran juga digunakan sebagai landasan atau pedoman dalam menyusun perencanaan kegiatan pada tahun tahun berikutnya.

Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja Biro Hukum dan Dumas ini selanjutnya akan disampaikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Biro Hukum dan Dumas untuk tahun anggaran 2024.



B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tahun 2020-2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023).
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu unit jabatan tinggi pratama di lingkungan Deputy Bidang Administrasi.

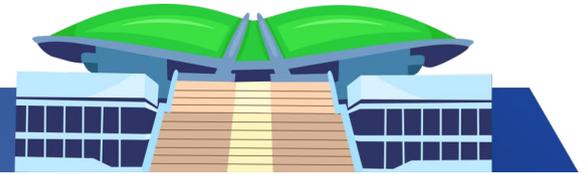
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Biro Hukum dan Dumas mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Hukum dan Dumas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Hukum dan Dumas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan hukum dan pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan legalisasi produk hukum Sekretariat Jenderal;
- d. pelaksanaan pembentukan dan evaluasi produk hukum;
- e. pelaksanaan pengelolaan pertimbangan dan dokumentasi informasi hukum;
- f. pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- g. dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang hukum;
- h. penyusunan laporan kinerja Biro Hukum dan Dumas; dan
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputy Bidang Administrasi.

2. Struktur Organisasi

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Biro Hukum dan Dumas mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Pasal 184 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Biro Hukum dan Dumas terdiri atas tiga unit kerja yaitu :



- a. Bagian Pembentukan Produk Hukum;
- b. Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum;
- c. Bagian Pengaduan Masyarakat.

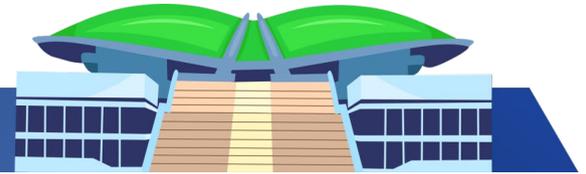
Adapun struktur organisasi Biro Hukum dan Dumas dapat disampaikan sebagaimana Gambar 1.1

Gambar .1.1
Struktur Organisasi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat



Sumber : Surat MenPANRB Nomor B/1067/M.KT.01/2024 tentang Persetujuan Penyederhanaan Birokrasi Setjen DPR RI tahap 2 Tanggal 14 September 2024.

Namun berdasarkan persekjen Nomor 12 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Biro Hukum dan Dumas, mengalami perubahan akibat adanya kebijakan penyederhaan organisasi. Perubahan tersebut adalah sesuai surat MenPANRB Nomor B/1067/M.KT.01/2024 tentang Persetujuan Penyederhanaan Birokrasi Setjen DPR RI tahap 2 Tanggal 14 September 2024, yang menghilangkan jabatan pelaksana pada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui Jabatan Fungsional Analisis Hukum.



3. Komposisi Pegawai

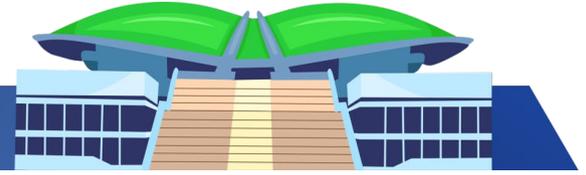
Biro Hukum dan Dumas didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan data dari Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, sampai dengan Desember 2024 komposisi jumlah pegawai Biro Hukum dan Dumas mengalami penambahan 8 (delapan) orang pegawai dari sebelumnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang pegawai di tahun 2023, yang terdiri dari pejabat struktural 4 (empat) orang, 7 (tujuh) orang pejabat fungsional, 12 (lima belas) orang staf pelaksana, serta 17 (tujuh belas) orang tenaga sistem pendukung (TSP). Secara keseluruhan jumlah 40 (empat puluh) pegawai di Biro Hukum dan Dumas sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1.1
Komposisi Jumlah Pegawai Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

No	Biro	Pejabat Struktural	Pelaksana	Pejabat Fungsional	TSP	Jumlah
1.	Biro Hukum	1	0	1	2	4
2.	Bagian PPH	1	2	4	5	12
3.	Bagian PDIH	1	3	0	5	9
4.	Bagian Pengaduan Masyarakat	1	7	2	5	15
	Jumlah	4	12	7	17	40

Sumber : Data Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Desember 2024

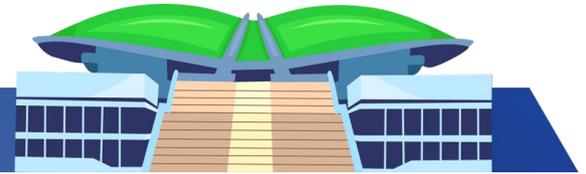
Dalam periode tahun 2024, Biro Hukum dan Dumas mengalami beberapa kali perubahan jumlah dan status pegawai. Perubahan status pejabat fungsional menjadi pejabat struktural 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang pelaksana menjadi pejabat fungsional. Kemudian Biro Hukum dan Dumas menerima pelimpahan pegawai 1 (satu) orang dari Lembaga Ketahanan Nasional dengan status pejabat fungsional Analis Kebijakan.



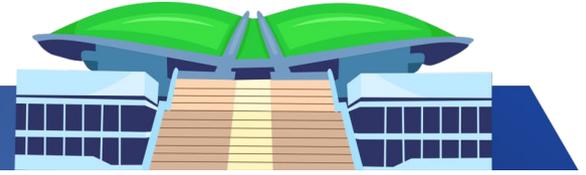
D. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Isu strategis yang dihadapi Biro Hukum dan Dumas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan membutuhkan respon cepat untuk menentukan rekomendasi terhadap produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI yang terdampak apakah tetap berlaku, diubah, dicabut, atau diganti.
2. Pengusulan produk hukum yang disampaikan oleh unit pengusul tidak dilengkapi latar belakang alasan dibutuhkannya produk hukum yang diusulkan dan data-data pendukung yang cukup.
3. Pemahaman unit kerja terhadap implementasi kebijakan yang diwujudkan dalam produk hukum masih perlu ditingkatkan. Pemahaman ini diperlukan untuk mendorong sensitivitas urgensi perlunya penyusunan suatu produk hukum.
4. Penanganan perkara hukum (gugatan) kepada DPR RI ataupun Setjen DPR RI yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Dumas adalah untuk menjawab atau merespon gugatan masyarakat (perorangan atau kelompok) terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional Dewan yang diajukan melalui lembaga peradilan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dewan. Penyelesaian atas gugatan perkara hukum tersebut sangat tergantung pada proses persidangan di lembaga peradilan yang setiap perkara berbeda-beda waktu penyelesaiannya serta memerlukan SDM dengan kompetensi khusus dalam beracara di Pengadilan.
5. Untuk memenuhi kebutuhan informasi publik akan dokumentasi dan informasi hukum yang ada di DPR RI yang diakses melalui *Website JDIH Setjen DPR RI* perlu pengembangan lebih lanjut Web JDIH Setjen DPR RI melalui inovasi fitur atau menu-menu baru yang dapat mempermudah akses publik untuk mendapatkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang lebih tepat, cepat, dan optimal.
6. Sosialisasi penggunaan JDIH Setjen DPR RI belum optimal.
7. Kurangnya koordinasi yang lebih intensif dengan Anggota JDIH Setjen DPR RI (Unit Kerja Terkait), sehingga pemberian layanan dokumentasi dan informasi hukum dapat terintegrasi satu pintu melalui Website JDIH Setjen DPR RI dimana Biro Hukum dan Dumas dalam hal ini sebagai koordinator.



8. Tindak lanjut surat-surat pengaduan masyarakat yang telah dianalisis dan ditangani oleh Bagian Dumas belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), mengingat hal tersebut merupakan sepenuhnya kewenangan Pimpinan dan AKD DPR RI. Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang telah dianalisa dan diteruskan oleh Bagian Pengaduan Masyarakat kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), belum ditindaklanjuti secara optimal oleh AKD selaku pemilik kewenangan tindak lanjut surat-surat pengaduan masyarakat.
9. Koordinasi dengan Sekretariat AKD belum terlaksana secara optimal karena AKD belum melakukan pencatatan data tindak lanjut surat- surat pengaduan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 27 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2024, sehingga menyulitkan pengadu saat akan melakukan *tracking* perkembangan status surat pengaduan masyarakat.
10. Aplikasi SIDUMAS sebagai aplikasi khusus belum terintegrasi dengan SP4N LAPOR! sebagai aplikasi umum karena terkendala otorisasi dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi sebagai pengelola aplikasi. Belum terintegrasinya aplikasi ini membuat analis pengaduan masyarakat bekerja pada dua aplikasi sehingga pengerjaan analisa pengaduan masyarakat belum berjalan dengan optimal. Selain itu penyempurnaan aplikasi SIDUMAS yang masih dalam tahap pengembangan guna menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan organisasi dalam pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat.
11. Belum terintegrasinya atau belum terjadi interoperabilitas data pengaduan masyarakat di aplikasi SIDUMAS dengan aplikasi SP4N-LAPOR karena terkendala otorisasi dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi sebagai pengelola aplikasi. Belum terintegrasinya aplikasi ini membuat analis pengaduan masyarakat bekerja pada dua aplikasi sehingga pengerjaan analisa pengaduan masyarakat belum berjalan dengan optimal.
12. Terdapat perbedaan karakteristik aplikasi SP4N LAPOR! dengan analisa pengaduan di dumas, sehingga tindak lanjut pengaduan masyarakat menjadi penilaian mutlak SP4N LAPOR.
13. Kendala Penyederhanaan organisasi sebagai tindak lanjut Permenpan No.17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, yang dimulai tanggal 8 November 2024 belum juga diiringi dengan penataan SDM di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kurang optimal.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

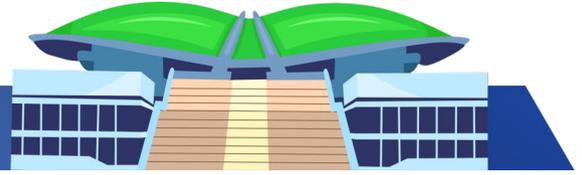
Biro Hukum dan Dumas sebagai unit pimpinan pratama memiliki tujuan untuk mendukung visi, misi dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI yang tertuang dalam Persekjen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2024. Visi Setjen DPR RI adalah **“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”**.

Sedangkan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.

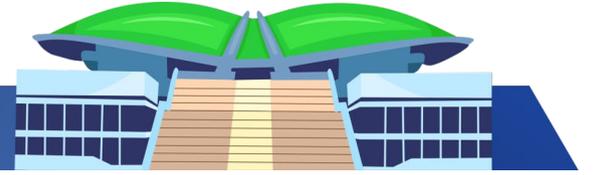


Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran dalam Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada 2020	Target Kinerja Pada 2021	Target Kinerja Pada 2022	Target Kinerja Pada 2023	Target Kinerja Pada 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	-	3,07	3,10	3,20	3,30
		Persentase capaian pembentukan produk hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Anggaran	-	-	-	93%	98%
		Nilai IKPA Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	-	-	-	-	96

Sumber : Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020- 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023.

Sasaran meningkatnya kualitas dukungan Biro Hukum dan Dumas ditetapkan untuk mendukung terwujudnya 3 (tiga) tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Indikator Kinerja dengan

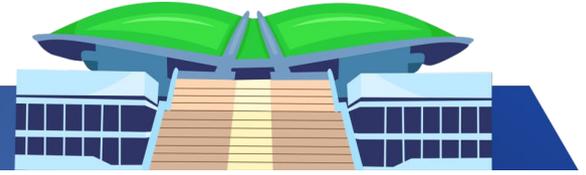


Target Kinerja tahunan dilaksanakan oleh masing-masing Bagian di Biro Hukum dan Dumas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum dengan target hingga Tahun 2024 sebesar 3,30, didukung sasaran/program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum. Sasaran/program kegiatan pada Tahun 2024 yang meliputi terlaksananya pembentukan produk hukum sesuai target, terlaksananya layanan pertimbangan Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan, terlaksananya layanan advokasi Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan, dan terlaksananya layanan Dokumentasi Informasi Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan.
- b. Persentase capaian pembentukan produk hukum dengan target hingga Tahun 2024 sebesar 100%, didukung sasaran/program kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pembentukan Produk Hukum di Tahun 2024 yang meliputi tercapainya perumusan produk hukum sesuai target, dan tercapainya evaluasi produk hukum sesuai target.
- c. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target hingga Tahun 2024 sebesar 100%, didukung sasaran/program kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pengaduan Masyarakat di Tahun 2024 yang meliputi tercapainya penyelesaian analisa aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR untuk disampaikan kepada AKD terkait, dan terlaksananya layanan administrasi atas pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang termuat dalam Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Biro Hukum dan Dumas memiliki Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.2.



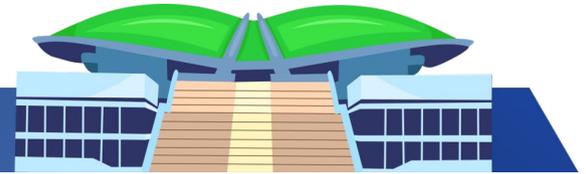
Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Meningkatnya kualitas dukungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	Indeks	3,30
			Persentase capaian pembentukan produk hukum	Persentase	100 %
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	100 %
			Persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Persentase	93 %

Sumber : Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

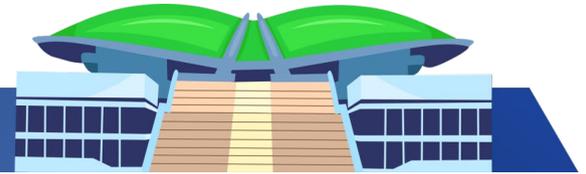
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen Penetapan Kinerja (PK), maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai bagian dari capaian kinerja. PK Biro Hukum dan Dumas merupakan sasaran program/kegiatan gabungan untuk satuan kerja Dewan dan satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. PK tersebut secara keseluruhan merupakan satu sasaran program/kegiatan Biro Hukum dan Dumas dengan 5 (lima) indikator kinerja sebagaimana pada Tabel 2.3.



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya kualitas dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	Indeks	3,30	
		Persentase capaian pembentukan produk hukum	Persentase	100 %	
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persentase	100 %	
		Nilai IKPA Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output 	Indeks	96,10
					9,60
					19,20
24,00					
14,40					
28,86					
Persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Persentase	98 %			

Dalam Tabel Rencana Strategis pada Tabel 2.1 dan Tabel Rencana Kinerja Tahun 2024 pada Tabel 2.2, terdapat perbedaan indikator kinerja dengan Perjanjian Kinerja pada Tabel 2.3. Tabel Rencana Strategis sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1 merupakan rencana 5 (lima) tahun yang disusun untuk tingkat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.2. Namun dalam perkembangannya, guna penyusunan anggaran 2024, maka dalam Rencana Kerja Tahunan 2024 perlu dicantumkan target capaian



realisasi anggaran sehingga semua pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat dilakukan secara terukur.

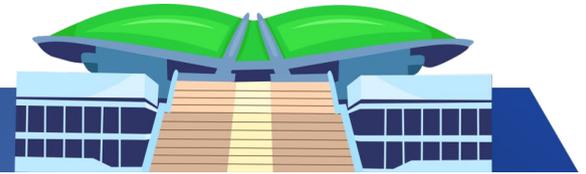
Selain program dan sasaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat juga menjadi salah satu unit kerja yang mendapatkan predikat Zona Integritas dalam kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan masuk dalam program pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini sebagai wujud konsistensi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dalam mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Guna mencapai sasaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3 yaitu meningkatnya kualitas dukungan hukum dan pengaduan masyarakat, perlu diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang tergambar dalam pelaksanaan tugas-tugas pada unit kerja di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

Adapun program kegiatan-kegiatan unit-unit kerja tersebut adalah sebagaimana tabel-tabel berikut :

Tabel 2.4
Program/Kegiatan Bagian Pembentukan Produk Hukum Tahun 2024

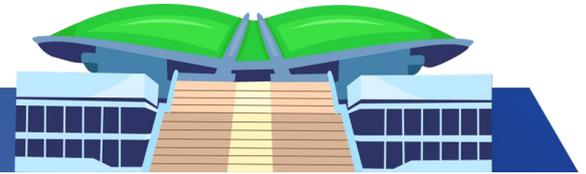
NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Persentase capaian pembentukan produk hukum	Perumusan produk hukum sesuai target	dokumen	1 Dokumen
		Pelaksanaan kegiatan evaluasi produk hukum sesuai target	dokumen	1 Dokumen
		Perumusan peraturan	dokumen	12 Dokumen



		sekjen		
		Perumusan MoU dan/atau Perjanjian	dokumen	12 Dokumen
		Identifikasi dan analisis usulan Persekjen	dokumen	12 Dokumen
		Evaluasi produk hukum	dokumen	12 Dokumen
2	Persentase realisasi anggaran Bagian Pembentukan Produk Hukum sesuai target.	Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran	dokumen	1 Dokumen
		Menyusun realisasi anggaran	dokumen	1 Dokumen

Tabel 2.5
Program/Kegiatan Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum Tahun 2024

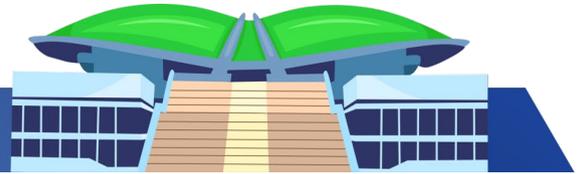
NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Persentase capaian produk hukum	Perumusan SK Sekjen	Dokumen	1 Dokumen
2	Indeks kepuasan pengguna layanan hukum	Laporan Advokasi Hukum	Dokumen	1 Dokumen
		Laporan Dokumentasi Informasi Hukum	Dokumen	1 Dokumen
		Laporan Realisasi Anggaran Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum	Dokumen	1 Dokumen



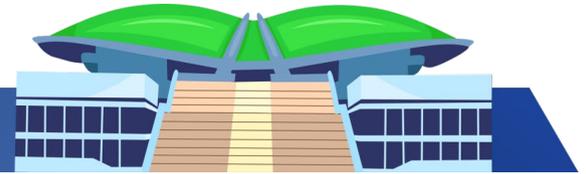
		Laporan Ketatausahaan Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum	Dokumen	1 Dokumen
		Laporan Pengelolaan Website JDIH	Dokumen	1 Dokumen
3	Persentase realisasi anggaran Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum.	Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran	dokumen	1 Dokumen
		Menyusun realisasi anggaran	dokumen	1 Dokumen

Tabel 2.6
Sasaran Program/Kegiatan Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	Administrasi dan pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI.	Dokumen	4 dokumen



		Analisis aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR dan Setjen untuk disampaikan kepada AKD terkait organisasi.	Dokumen	4 Dokumen
2	Menyusun realisasi anggaran Bagian Pengaduan Masyarakat	Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran dan menyusun realisasi anggaran	Dokumen	9



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

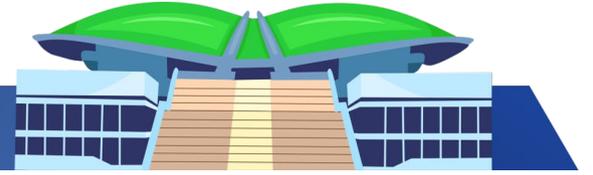
Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Setiap instansi pemerintah perlu melakukan pengukuran kinerja untuk membuktikan akuntabilitas kerjanya. Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2024.

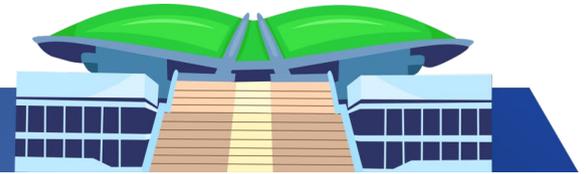
A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian pada setiap indikator yang telah ditetapkan dalam PK dengan realisasinya. Untuk seluruh sasaran program, indikator kinerja program, target, realisasi dan capaian Biro Hukum dan Dumas Tahun 2024 dapat ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut.



Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2024

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (Realisasi/ Target x 100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dukungan dan Pengaduan Masyarakat	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	3,30	3,73	113,03%
		Persentase capaian pembentukan produk hukum	100 %	100%	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100% (Sidumas)	100%
				100% (SP4N LAPOR!)	100%
Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Dewan)	98 %	99,87%	101%		

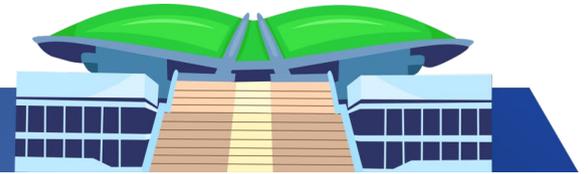


		Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Setjen)	98 %	99,82%	101%
		Nilai IKPA Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	96,10	87,10	90,6%
		• Revisi DIPA	9,60	10,00	104,17%
		• Deviasi Halaman III DIPA	19,20	7,52	39,1%
		• Penyerapan Anggaran	24,00	17,82	74,25%
		• Penyelesaian Tagihan	14,40	10,00	71,4%
		• Capaian Output	28,86	23,06	80%

Dari Tabel 3.1 diatas, dapat dilakukan analisis penilaian Realisasi Kinerja dengan skala peringkat kinerja. Sesuai interval nilai realisasi kinerja, Biro Hukum dan Dumas memiliki capaian realisasi pada interval nilai $91\% \leq 100\%$, yang masuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja **Sangat Tinggi**. Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian pada Tabel 3.1. tersebut juga menunjukkan bahwa Biro Hukum dan Dumas berhasil mencapai realisasi **melebihi target**.

Selain capaian yang merupakan target yang telah ditetapkan dalam sasaran program/kegiatan dalam Perjanjian Kinerja, Biro Hukum dan Dumas juga memperoleh penghargaan sepanjang tahun 2024. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh antara lain:

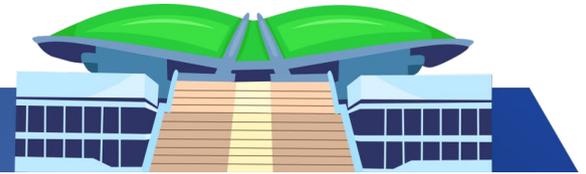
1. Penerima Penghargaan Peringkat Ketiga Atas Penilaian Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Penerima Penghargaan Raihan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik I Satker Dewan Semester I Tahun Anggaran 2024;



3. Penerima Penghargaan Raihan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Satker Dewan Triwulan III Tahun Anggaran 2024;
4. Penerima Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik Kedua Tahun 2024 untuk kategori Lembaga Negara; dan
5. Penerima Penghargaan sebagai Unit Kerja Zona Integritas dengan Predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2024



Gambar 2.1. Penghargaan Tahun 2024



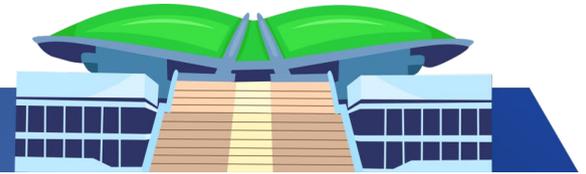
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

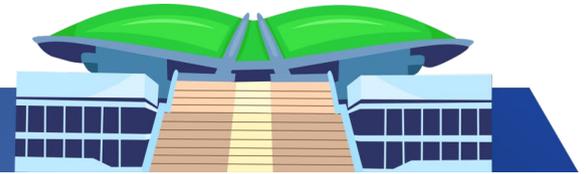
Berdasarkan angka capaian sasaran program dan kegiatan yang telah direalisasikan pada Tahun 2024 untuk Biro Hukum dan Dumas, menunjukkan bahwa Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat berhasil mencapai realisasi melebihi target. Meskipun demikian, perlu dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja. Pendekatan evaluasi dan analisis ini untuk mengukur seberapa besar tingkat capaian kinerja sasaran program dan kegiatan pada Tahun 2024. Hal ini dilakukan sebagai metode untuk mencermati kinerja yang telah dilakukan dengan cara membandingkan target dengan capaian/realisasi sebagai bahan untuk menilai kinerja suatu organisasi pada Biro Hukum dan Dumas.

Berdasarkan Tabel Pengukuran Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2024, setiap Indikator Kinerja Program didukung dengan rencana hasil kerja masing-masing Bagian di Biro Hukum dan Dumas, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan pada tahun 2024, Biro Hukum dan Dumas memperoleh nilai indeks **3,73**. Unsur yang memperoleh penilaian tertinggi terdapat pada unsur "waktu penyelesaian" dengan nilai indeks 94,245. Sedangkan unsur yang memperoleh nilai terendah adalah "pengaduan, saran, dan masukan" yang memperoleh indeks kepuasan 92,6025. Perolehan nilai hasil survei kepuasan pengguna terhadap dukungan layanan hukum Biro Hukum dan Dumas telah melebihi target indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum yang ditetapkan tahun 2024 sebesar **3,30**. Pencapaian indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum didukung hasil kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum di Tahun 2024.
2. Adapun hasil kegiatan Bagian Pembentukan Produk Hukum yang mendukung tercapainya indeks kepuasan pengguna layanan hukum adalah terlaksananya kegiatan pembentukan produk hukum sesuai target dengan hasil kerja Laporan pelaksanaan kegiatan perumusan produk hukum sesuai target sebanyak 1 (satu) dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi produk hukum sesuai target sebanyak 1 (satu) dokumen.



3. Kemudian hasil kegiatan Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum yang mendukung tercapainya indeks kepuasan pengguna layanan hukum adalah sebagai berikut:
 - a. Terlaksananya layanan pertimbangan Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan dengan hasil kerja Laporan Hasil Pertimbangan Hukum. Target kinerja 1 Dokumen Laporan, yang terdiri atas rekapitulasi layanan pemberian pertimbangan hukum atas Keputusan Sekretaris Jenderal (**1120 Dokumen**), Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (**205 Dokumen**), Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (**267 Dokumen**), Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang (**83 Dokumen**), pertimbangan hukum atas permasalahan Sekretariat Jenderal (**7 Dokumen**)
 - b. Terlaksananya layanan advokasi Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan hasil kerja Laporan Advokasi Hukum (1 Dokumen), yang berisi rekapitulasi pemberian advokasi sebanyak 15 (**lima belas**) perkara advokasi.
 - c. Terlaksananya layanan Dokumentasi Informasi Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan hasil kerja 1 dokumen Laporan pengelolaan JDIH.
 - d. Terselenggaranya pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Program Kerja, dengan hasil kerja Dokumen pelaksanaan Zona Integritas sesuai dengan Program Kerja (1 Dokumen).
4. Tercapainya persentase capaian pembentukan produk hukum dengan target hingga 2024 sebesar 100% didukung dengan hasil kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pembentukan Produk Hukum di Tahun 2024 yang meliputi tercapainya perumusan produk hukum sesuai target dan tercapainya evaluasi produk hukum sesuai target, dengan rincian output sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2024 telah dilakukan pembahasan terhadap **13 (tiga belas)** usulan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI. 8 (delapan) usulan telah ditetapkan menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dan berlaku di Tahun 2024, sedangkan 5 (lima) usulan berdasarkan dinamika pembahasan serta adanya perubahan prioritas unit kerja pengusul tidak ditetapkan pada tahun 2024 dan akan diusulkan Kembali pada tahun 2025;
 - 2) **15 (lima belas)** dokumen evaluasi produk hukum;



- 3) **16 (enam belas)** dokumen identifikasi dan analisis;
- 4) **61 (enam puluh satu)** perumusan dokumen MoU/perjanjian.
5. Capaian persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100% untuk pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Sidumas, dan 100% untuk pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi SP4N LAPOR! didukung dengan sasaran/program kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pengaduan Masyarakat di Tahun 2024 yang meliputi tercapainya penyelesaian analisa aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR untuk disampaikan kepada AKD terkait, dan terlaksananya layanan administrasi atas pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI.

Dalam Perjanjian Kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat, terdiri dari Terlaksananya layanan administrasi atas pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI dengan target 4 Dokumen, dan Terlaksananya realisasi anggaran Bagian Dumas sesuai target yang ditetapkan dengan target 9 dokumen.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2024 telah disebutkan bahwa kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat ditunjukkan dengan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, sehingga *output* kinerja bagian ini adalah persentase pengaduan masyarakat dengan dua indikator sebagai berikut:

A. Terlaksananya Administrasi atas Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat

Target : 4 Dokumen

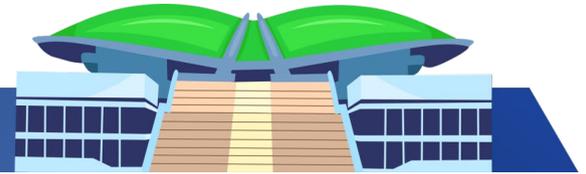
Realisasi terlaksananya administrasi atas pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat telah mencapai **100%, dengan rincian sebagai berikut:**

1. Nota Dinas ke Deputi Bidang Administrasi

Jumlah dokumen administrasi yang diselesaikan sebanyak **794 (tujuh ratus sembilan puluh empat)** dokumen.

2. Penyampaian Surat Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat ke Pimpinan/AKD/Badan

Jumlah dokumen administrasi yang diselesaikan sebanyak **452 (empat ratus lima puluh dua)** dokumen.



3. Surat Tanggapan/Pemberitahuan kepada Pengadu

Jumlah dokumen administrasi yang diselesaikan sebanyak **1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima)** dokumen.

B. Penyelesaian Analisa Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat

Target : 4 Dokumen

Realisasi penyelesaian analisa aspirasi dan pengaduan masyarakat baik melalui SIDUMAS dan SP4N-LAPOR! telah mencapai **100%**, dengan rincian sebagai berikut:

1. SIDUMAS

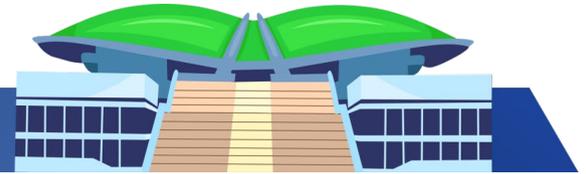
Jumlah surat masuk melalui SIDUMAS sebanyak **4.653 surat (empat ribu enam ratus lima puluh tiga)** yang terdiri atas:

- a. Surat Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat **Tertulis** sebanyak **4.261 (empat ribu dua ratus enam puluh satu)**; dan
- b. Surat Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat *Online* sebanyak **392 (tiga ratus sembilan puluh dua)**.

2. SP4N-LAPOR!

Aspirasi dan pengaduan masyarakat yang diterima dan diselesaikan oleh Bagian Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR sebanyak **188 (seratus delapan puluh delapan)** laporan.

6. Tercapainya indikator kinerja persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Dumas didukung dengan tersedianya Laporan Realisasi Anggaran dan ketatausahaan dari masing-masing bagian di bawah Biro Hukum dan Dumas.
7. Biro Hukum dan Dumas juga melakukan peningkatan kapabilitas SDM di bidang penelitian hukum, peningkatan pelayanan prima, *legislative drafting*, Bimbingan Teknis pengembangan Website JDIH, dan sosialisasi mengenai pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Sosialisasi Persekjen No. 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aspirasi Pengaduan Masyarakat kepada DPR RI dan Pembahasan Laporan Pengaduan Masyarakat ke Pimpinan



Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Sosialisasi Aplikasi AIRA sebagai bentuk Inovasi dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat kepada Alat Kelengkapan Dewan DPR RI, dan Klarifikasi dan Verifikasi Data Pengaduan Masyarakat di BPN RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Satu Pintu Surat Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Ke DPR RI.

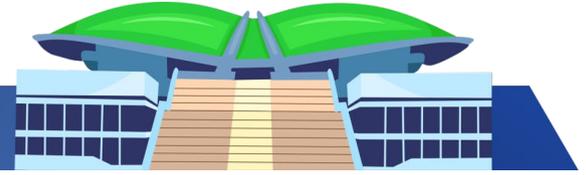
8. Indikator IKPA dengan target 96,10 hanya tercapai sebanyak 87,10 dengan persentase capaian target 90,6% dari target. Capaian tersebut tidak sesuai dengan target disebabkan karena:
- 1) Adanya kebijakan pemerintah untuk Optimalisasi Anggaran dan beberapa program kegiatan tambahan yang mendesak sehingga berpengaruh kepada batas maksimal revisi yang ditetapkan;
 - 2) Akibat adanya penambahan program kegiatan baru, menyebabkan Deviasi Halaman III DIPA tidak memenuhi ambang batas.

2. Perbandingan Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja pada tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dan 2022. Hasil perbandingan capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas pada tahun 2024 dapat ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Biro Hukum Dumas Tahun 2021 s.d 2024

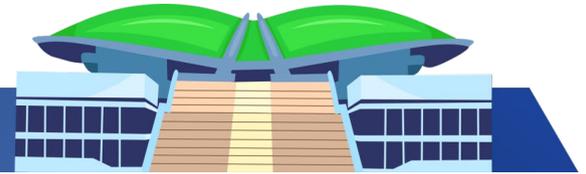
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)									
1.	Meningkatnya kualitas dukungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	3,07	3,37	109%	3,09	3,20	103%	3,20	3,77	117%	3,30	3,73	113%
		Persentase capaian pembentukan produk hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Sidumas)	100%	100%	100% (Sidumas)	100%
								100% (SP4N LAPOR!)			100% (SP4N LAPOR!)	
Nilai IKPA Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96,10	87,10	90,6%
Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Dewan)	92 %	39,42 %	42%	92 %	99,77 %	108%	93%	99,77 %	107%	98%	99,87 %	101%
Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Setjen)	92 %	98,94 %	107%	92 %	99,85 %	108%	93%	99,59 %	107%	98%	99,82 %	101%

Berdasarkan Perbandingan Capaian Kinerja Biro Hukum Dumas Tahun 2021 s.d 2024 pada Tabel 3.2 diatas, dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum mengalami penurunan capaian pada tahun 2024 dengan nilai indeks **3,73**, dibandingkan tahun 2023 yang mencapai nilai **3,77**.
2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai target (100%), dimana layanan pengaduan melalui aplikasi Sidumas 100%, sedangkan untuk pengaduan melalui aplikasi SP4N LAPOR! dengan persentase 100%.
3. Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Dumas (Satker Dewan) mengalami kenaikan capaian dari tahun 2023 sebesar 99,77% dengan realisasi menjadi 99,87% di tahun 2024.



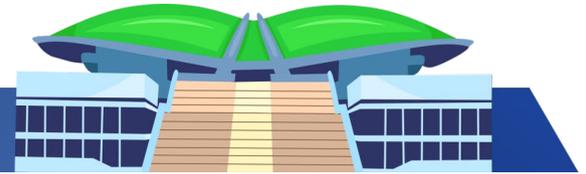
4. Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Dumas (Satker Setjen) mengalami kenaikan capaian dari tahun 2023 sebesar 99,59% dengan realisasi menjadi 99,82% di tahun 2024.
5. Capaian IKPA tahun 2024 sebesar 87,10 dari target 96,10 atau sebesar 90,6% dari target.
6. Nilai Indikator IKPA ini merupakan Indikator Kinerja Baru Pada Tahun 2024.

Dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas **cenderung mengalami tren naik**, dengan beberapa faktor pendorong kenaikan seperti Jumlah Perkara yang ditangani Biro Hukum dan Dumas mengalami kenaikan dari target 3 (tiga) perkara menjadi 15 (lima belas) perkara yang ditangani baik di Kota Jakarta, maupun di luar Kota Jakarta, terdapat 2 (dua) kali penyelenggaraan kegiatan untuk Peningkatan Kapasitas Analis Hukum yang diikuti Analis Hukum di Biro Hukum dan Dumas.

Benchmarking yang dilaksanakan di beberapa daerah oleh Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, dan Bagian Pengaduan Masyarakat. Kegiatan pembahasan pembentukan dan evaluasi produk hukum, baik untuk peraturan, nota kesepahaman, dan/atau perjanjian oleh Bagian Pembentukan Produk Hukum. Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Produk Hukum dan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum melalui Aplikasi Legalitas kepada Unit Kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI juga secara kontinu dilakukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra

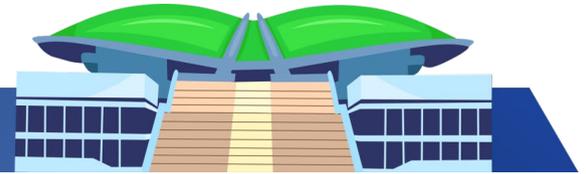
Kemajuan capaian strategis berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra tahun 2024 hampir semua indikator kinerja telah mencapai kemajuan 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.3



Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
1	2	3	5	4	6
1	Meningkatnya kualitas dukungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	3,73	3,30	113,03%
		Persentase capaian pembentukan produk hukum	100%	100%	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		IKPA	87,10	N/A	90,6%
		Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Dewan)	99,87%	N/A	101%
		Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Setjen)	99,82%	N/A	101%

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada tahun 2024 telah melampaui capaian akhir Renstra (tahun 2024) yang ditetapkan sebesar 3,30. Adapun langkah yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai pada setiap unsur dari indikator kinerja yang dinilai indeks kepuasan layanan hukum sebagai berikut:



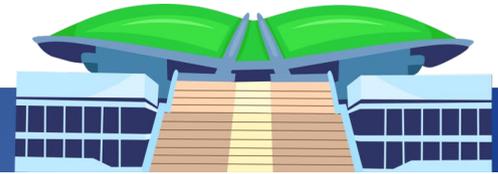
1. Persentase capaian pembentukan produk hukum telah mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan;
2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi sidumas mencapai 100% dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SP4N LAPOR mencapai 100%;
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 87,10 dari target 96,10 atau sebesar 90,6% dari target Namun Indikator Target akhir untuk Indikator IKPA tidak tercantum di Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020-2024 sehingga tidak bisa menghubungkan capaian IKPA 2024 dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020-2024.;
4. Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan. Target akhir untuk Persentase Realisasi Anggaran tidak tercantum di Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020-2024;

Dari Capaian target dari setiap indikator kinerja Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana digambarkan diatas, telah melebihi dari target jangka menengah yang telah ditetapkan.

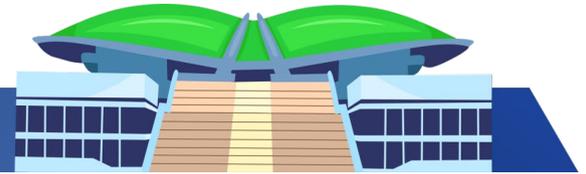
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Capaian Kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

*Tabel 3.4
Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja*

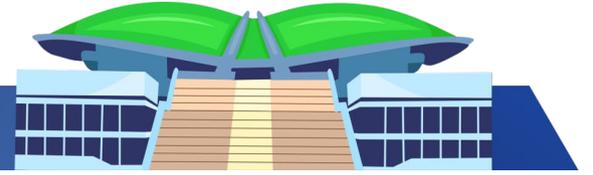
NO	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	3,30	3,73	113 %



Analisis Keberhasilan/Kegagalan :		Kepuasan pengguna layanan hukum dengan indeks tertinggi pada "Perilaku SDM". Unsur yang memperoleh nilai terendah adalah "sistem, mekanisme, dan prosedur".		
Solusi atau Upaya yang Dilakukan :		Mempertahankan kualitas produk layanan dan mengupayakan efisiensi waktu penyelesaian layanan.		
2	Persentase capaian pembentukan produk hukum	100 %	100 %	100 %
Analisis Keberhasilan/Kegagalan :		Produk Hukum yang disusun sesuai dengan Target didukung dengan adanya Program Legislasi di Sekretariat Jenderal, evaluasi Produk Hukum, serta telah ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Produk Hukum.		
Solusi atau Upaya yang Dilakukan :		Mempertahankan capaian pembentukan produk hukum.		
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100% (Sidumas) 100% (SP4N LAPOR!)	100% (Sidumas) 100% (SP4N LAPOR!)
Analisis Keberhasilan/Kegagalan :		Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dengan prinsip efektif dan efisien.		
Solusi atau Upaya yang Dilakukan :		Meningkatkan kualitas dan kuantitas capaian penanganan Surat Pengaduan.		
4	Nilai IKPA Biro Hukum dan Dumas	96,10	87,10	90,6%
Analisis Keberhasilan/Kegagalan :		Target IKPA yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat untuk tahun 2024 adalah sebesar 96,10 dan capaian untuk tahun 2024 adalah 87,10 namun capaian tersebut tidak dapat dijadikan dasar penilaian kualitas pengelolaan anggaran karena tidak dicantumkan di dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI		



Solusi atau Upaya yang Dilakukan :		Mencantumkan target IKPA didalam Perencanaan Strategis agar kualitas pengelolaan anggaran dapat terukur.		
5	Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Dewan)	98 %	99,87	101%
Analisis Keberhasilan/Kegagalan :		Jumlah Perkara yang ditangani Biro Hukum dan Dumas mengalami kenaikan dari target 3 (tiga) perkara menjadi 15 (lima belas) perkara yang ditangani baik di Kota Jakarta, maupun diluar Kota Jakarta.		
Solusi atau Upaya yang Dilakukan :		Realisasi tergantung pada perkara yang masuk ke DPR RI, namun perlu memperbarui SOP dan melaksanakan upaya preventif dalam penanganan perkara seperti menyediakan wadah untuk pelayanan advokasi litigasi dan non litigasi.		
6	Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Setjen)	98%	99,82	101%
Analisis Keberhasilan/Kegagalan :		Pelaksanaan kegiatan Biro Hukum dan Dumas sesuai cash planning dan action plan yang telah disusun pada awal tahun anggaran.		
Solusi atau Upaya yang Dilakukan :		Mempertahankan capaian realisasi Anggaran.		



5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

a. Waktu Penyelesaian Layanan

Perbaikan pada unsur waktu penyelesaian layanan dapat dilakukan dengan meningkatkan kecepatan dan kecermatan dalam memberikan layanan, membuat target waktu penyelesaian layanan, serta dapat menggunakan teknologi informasi yang dapat mempersingkat birokrasi dan waktu layanan. selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlu mengintensifkan komunikasi dengan pengguna layanan bidang hukum melalui forum konsultasi dan koordinasi.

b. Sarana dan Prasarana

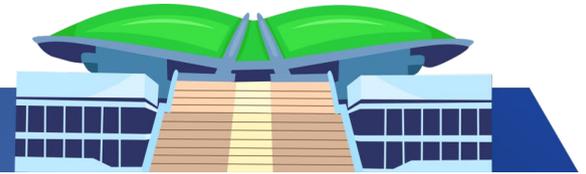
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Biro Hukum dan Dumas diperlukan perbaikan sarana dan prasarana teknologi informasi dalam bentuk pengembangan aplikasi Legalitas (Aplikasi Pengajuan Pembentukan Produk Legal Terintegrasi), pengembangan tampilan maupun menu *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan aplikasi Sidumas agar lebih optimal dengan penggunaan kecerdasan artifisial (*Artificial Intelligence*), sosialisasi penggunaan ruang konsultasi hukum dan pengaduan masyarakat.

c. Persyaratan Pelayanan

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan Biro Hukum dan Dumas perlu mengintensifkan sosialisasi berbagai media/kanal terkait standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme layanan hukum seperti Pembentukan/Perumusan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI, !penyusunan surat keputusan Sekjen, MoU/Perjanjian Kerjasama (PKS), pengelolaan pengaduan masyarakat, evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, pemberian pertimbangan dalam menyusun Keputusan, advokasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).

d. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Saran/rekomendasi untuk unsur ini adalah perlu adanya penyederhanaan mekanisme maupun prosedur dalam pemberian layanan yang memudahkan pengguna layanan, perlu adanya penambahan SDM agar dapat mempercepat



layanan, serta perlu adanya pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan pengguna layanan.

e. Kompetensi dan Perilaku SDM

Survei terhadap Kompetensi dan Perilaku SDM dilakukan dengan menilai profesionalitas SDM dan kompetensi SDM dalam memberikan layanan hukum. Saran/rekomendasi terkait kompetensi dan perilaku SDM adalah meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai melalui pelatihan-pelatihan, serta meningkatkan keramahan melalui 3 S (Senyum, Salam, Sapa) pada saat memberikan layanan.

f. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan antara lain meningkatkan respon terhadap aduan/saran/masukan yang disampaikan pengguna layanan serta menambah media/sarana untuk menyampaikan aduan/saran/masukan terkait layanan hukum.

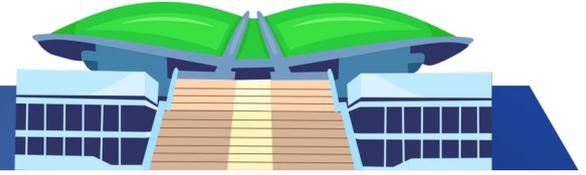
g. Produk Spesifikasi Jenis Layanan

Upaya meningkatkan kepuasan unsur ini agar Biro Hukum dan Dumas terus meningkatkan kualitas produk layanan yang diberikan agar dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi penerima layanan.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Tabel 3.5
Tingkat Efisiensi Capaian Komponen Perencanaan Kinerja*

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja		Anggaran		Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	3,30	3,73	4.411.776.000	4.404.034.196	88.32%
2	Persentase capaian pembentukan produk hukum	100%	100%	924.365.000	924.350.485	99.99%



3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100% (Sidumas) 100% (SP4N LAPOR!)	498.411.000	496.873.610	99.69%
---	------------------------------------------------------	------	--------------------------------------	-------------	-------------	--------

Dari tabel 3.5 diatas, dapat dilakukan analisis bahwa Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pencapaian indikator Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum yaitu sebesar 88,32% dari total pagu yang direncanakan, indikator Persentase capaian pembentukan produk hukum sebesar 99,99% dari total pagu yang direncanakan dan Indikator Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 99,69% dari total pagu yang direncanakan. Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran atas kegiatan tersebut efisien.

C. REALISASI ANGGARAN

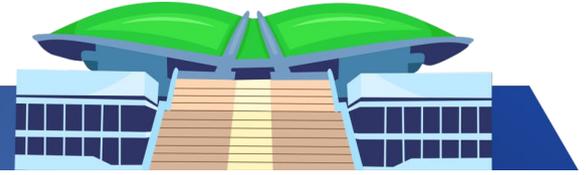
Selanjutnya, dari sisi dukungan anggaran untuk Biro Hukum dan Dumas, untuk pagu anggaran pada tahun 2024 semula sebesar Rp. **4.411.776.000,-** (Empat Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), terbagi dalam Satker Dewan sebesar Rp. **669.169.000,-** (enam ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan Satker Setjen sebesar Rp. **3.742.607.000,-** (Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah). Dukungan anggaran untuk Biro Hukum dan Dumas ini mengalami beberapa revisi.

Perbandingan pagu anggaran Biro Hukum dan Dumas tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini :

*Tabel 3.6
Persandingan Pagu Anggaran Biro Hukum dan Dumas Tahun 2024*

No	SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN			
		TAHUN 2023 Sebelum revisi	TAHUN 2023 Setelah revisi	TAHUN 2024 Sebelum revisi	TAHUN 2024 Setelah revisi
1.	Satker Dewan	716.617.000,-	737.287.000,-	669.169.000 ,-	669.169.000 ,-
2.	Satker Setjen	3.954.938.000,-	3.627.938.000,-	4.773.668.000 ,-	3.742.607.000 ,-
	JUMLAH	4.671.555.000,-	4.365.225.000,-	5.442.837.000,-	4.411.776.000,-

Sumber : Data Biro Keuangan, 2024.



Diketahui terjadi penurunan pagu anggaran pada tahun 2024 pada satker Dewan, dibanding tahun 2023 yaitu pada satker Dewan untuk tahun 2023 sebesar 737.287.000,- dan pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 669.169.000,- yaitu turun sebesar Rp. 68.188.000,-. Penurunan anggaran Satker Dewan untuk Biro Hukum dan Dumas dikarenakan realokasi kebutuhan anggaran untuk kegiatan Dewan yang lain.

Pagu anggaran untuk Satker Setjen setelah revisi untuk anggaran tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi kenaikan, dimana pada anggaran satker Setjen tahun 2023 sebesar Rp. 3.627.938.000,- dan pada tahun anggaran 2024 menjadi sebesar yaitu 3.742.607.000,-, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 114.669.000,-.

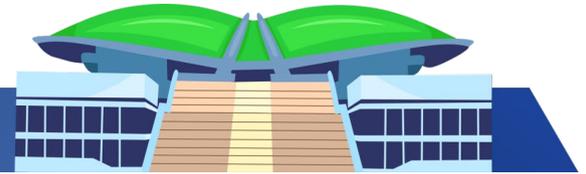
Untuk melihat capaian atau realisasi pengelolaan anggaran Biro Hukum dan Dumas pada Tahun Anggaran 2024, maka disampaikan perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran pada empat triwulan sebagaimana Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 sebagai berikut:

*Tabel 3.7
Realisasi Pengelolaan Anggaran Satker Dewan Selama
Tahun Anggaran 2024*

No	Biro Hukum dan Dumas	Satker Dewan		
		Pagu	Realisasi	%
1	Triwulan I	669.169.000,-	233.957.550,-	34,96
2	Triwulan II	669.169.000,-	361.127.550,-	53,96
3	Triwulan III	669.169.000,-	515.764.774,-	77,07
4	Triwulan IV	669.169.000,-	668.300.291,-	99,43
	Jumlah (revisi terakhir)	669.169.000,-	668.300.291,-	99,87

Sumber : Data Biro Hukum dan Dumas, 2024

Pada Satker Dewan Tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp. 669.169.000,- telah terealisasi selama empat triwulan sebesar **Rp. 668.300.291,- atau 99.87%**.



Tabel 3.8
Realisasi Pengelolaan Anggaran Satker Setjen Selama Tahun Anggaran 2024

No	Biro Hukum dan Dumas	Satker Setjen		
		Pagu	Realisasi	%
1	Triwulan I	4.473.668.000,-	730.754.730,-	16,33
2	Triwulan II	3.742.607.000,-	1.873.061.590,-	49,95
3	Triwulan III	3.742.607.000,-	2.726.089.205,-	72,83
4	Triwulan IV	3.742.607.000,-	3.735.733.905,-	99,82
	Jumlah (revisi terakhir)	3.742.607.000,-	3.735.733.905,-	99,82

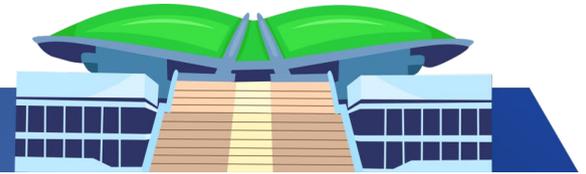
Sumber : Data Biro Hukum dan Dumas, 2024.

Sedangkan pada Satker Setjen Tahun 2024 dengan pagu sebesar Rp. 3.742.607.000,- telah dapat direalisasikan selama empat triwulan sebesar **Rp. 3.735.733.905,- atau 99,82 %**.

Selanjutnya capaian realisasi anggaran Tahun 2024 secara rinci di Biro Hukum dan Dumas, Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum dan Bagian Pengaduan Masyarakat sebagaimana tabel 3.9 dan 3.10 berikut ini.

Tabel 3.9
Capaian Realisasi Anggaran Satker Dewan Biro Hukum Dan Pengaduan Masyarakat Tahun Anggaran 2024

No	Kegiatan	Satker Dewan		
		Pagu (Revisi Terakhir)	Realisasi	%
1	Anggaran Biro Hukum dan Dumas	-	-	-
2	Anggaran Bagian PPH			
3	Anggaran Bagian PDIH	669.169.000,-	668.300.291,-	99,87



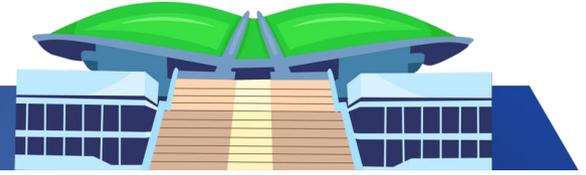
4	Anggaran Bagian Dumas	-	-	-
	Jumlah(revisi terakhir)	669.169.000,-	668.300.291,-	99,87

Sumber : Data Biro Hukum dan Dumas, 2024.

*Tabel 3.10
Capaian Realisasi Anggaran Satker Setjen Biro
Hukum Dan Pengaduan Masyarakat
Tahun Anggaran 2024*

No	Kegiatan	Satker Setjen		
		Pagu (Revisi Terakhir)	Realisasi	%
1	Anggaran Biro Hukum dan Dumas	1.745.320.000,-	1.743.735.110,-	99,90
2	Anggaran Bagian PPH	924.365.000,-	924.350.485,-	99,99
3	Anggaran Bagian PDIH	574.511.000,-	570.774.700,-	99,35
4	Anggaran Bagian Dumas	498.411.000,-	496.873.610,-	99,69
	Jumlah (revisi terakhir)	3.742.607.000,-	3.735.733.905,-	99,82

Sumber : Data Biro Hukum dan Dumas, 2024

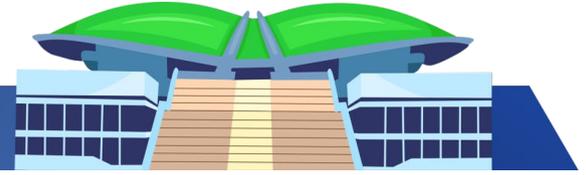


BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Hukum dan Dumas tahun 2024, menunjukkan bahwa seluruh target pada indikator kinerja dapat tercapai. Selanjutnya realisasi anggaran Biro Hukum dan Dumas tahun 2024 gabungan Satker Dewan dan Satker Setjen adalah sebesar Rp. 4.404.034.196,- (Empat milyar empat ratus empat juta tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), terbagi dalam Satker Dewan sebesar Rp. 668.300.291,- atau 99,87% dari DIPA Tahun 2024 sebesar 669.169.000 atau 0,13% dan Satker Setjen sebesar Rp. 3.735.733.905,- atau 99,82% dari DIPA Tahun 2024 sebesar Rp. 4.411.776.000,- atau 0,18%.

Selanjutnya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Biro Hukum dan Dumas untuk memperbaiki kinerja Tahun 2024 dan menghadapi tantangan ke depan antara lain:

1. Sosialisasi terhadap layanan standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme Pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.
2. Pengembangan aplikasi legalitas yang memuat layanan evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Inventarisasi produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini sehingga dapat ditindaklanjuti melalui evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.
4. Perlu adanya sistem tracking produk hukum yang sudah ada untuk rekam jejak beserta produk hukum yang sudah dilakukan perubahan.
5. Memaksimalkan peluang koordinasi dan kerjasama dengan berbagai kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Dumas.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan anggaran secara efisien dan efektif melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai, serta dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak/para pemangku kepentingan.



7. Koordinasi dengan Kemenpan RB, Pustekinfo, Komisi/Badan, serta unit kerja lain yang menangani pengaduan masyarakat perlu ditingkatkan, terutama dalam upaya pengembangan aplikasi Sidumas dan SP4N LAPOR! sehingga dapat membantu tugas DPR RI dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dengan lebih optimal sehingga memberikan citra Dewan yang positif dimata masyarakat. selain itu, telah dibangun aplikasi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) untuk membantu efektifitas penanganan pengaduan masyarakat oleh Dewan.
8. Mempercepat dan mengoptimalkan pengembangan sistem JDIH Setjen DPR RI (jdih.dpr.go.id) khususnya website JDIH Setjen DPR RI yang saat ini telah terintegrasi dengan JDIH Nasional dengan menampilkan inovasi berupa fitur atau menu baru serta kelengkapan metadata yang dapat memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan layanan informasi dan dokumentasi hukum melalui Website JDIH Setjen DPR RI yang lebih cepat, efisien dan efektif.
9. Prestasi yang telah dicapai antara lain dalam bidang pengelolaan anggaran dan sebagai anggota JDIHN perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

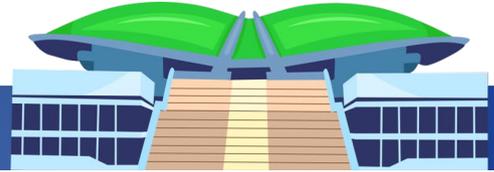
Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Endang Suryastuti, S.H., M.Si



LAMPIRAN



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Suryastuti, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Sumariyandono, MPM,
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

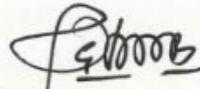
Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

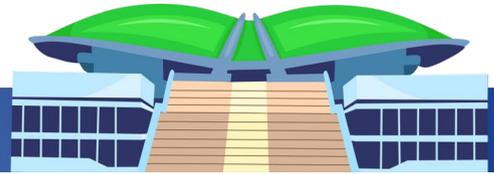
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Ir. Sumariyandono, MPM.
NIP. 19650618 198811 1 001

Jakarta, 6 Desember 2023
Pihak Pertama,


Endang Suryastuti, S.H., M.Si.
NIP. 19690801 199403 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

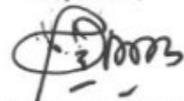
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan bidang Hukum	3,30
		2. Persentase capaian pembentukan produk hukum	100%
		3. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		4. Nilai IKPA Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	96
		<ul style="list-style-type: none"> - Revisi DIPA 9,60 - Deviasi Halaman III DIPA 19,20 - Penyerapan Anggaran 24,00 - Penyelesaian Tagihan 14,40 - Capaian Output 28,80 	
5. Persentase Realisasi Anggaran	98%		

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp4.473.668.000,00

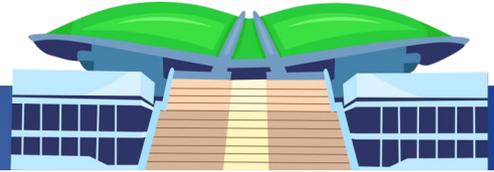
Deputi Bidang Administrasi,


Ir. Sumariyandono, MPM,
 NIP. 19650618 198811 1 001

Jakarta, 6 Desember 2023
 Kepala Biro Hukum dan Pengaduan
 Masyarakat,


Endang Suryastuti, S.H., M.Si.
 NIP. 19690801 199403 2 001





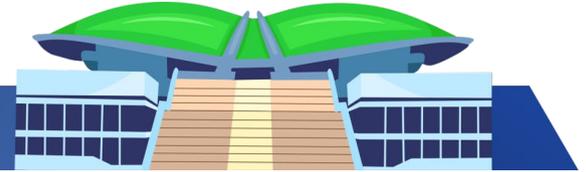
**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 46/PI/01/2025

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, perlu menyusun Laporan Kinerja Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024;
 - b. bahwa agar penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024;
 - c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Surat Tugas;
- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

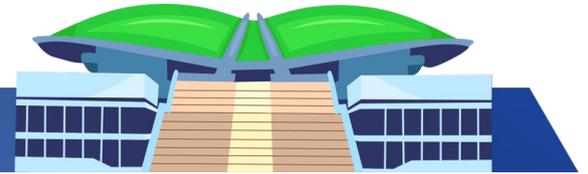


7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Memberi Tugas:

Kepada :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Endang Suryastuti, S.H., M.Si.	Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Pengarah
2.	Dwi Frihartomo, S.H., M.H.	Kepala Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Produk Hukum	Ketua
3.	Erni Husniyati, S.H., M.H.	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat	Wakil Ketua
4.	Reno Tria Krisnadi, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Sekretaris
5.	Budi Wuryanto, S.H.	Kepala Bagian Pembentukan Produk Hukum	Anggota
6.	Irna Gusvita Indrikasari, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
7.	Jacob Junian Endiartia, SE., MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8.	Leo Krissandy Theo Rimbun Marulak, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
9.	Anisa Rahmasari, S.H., M.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10.	Ridha Khoirunnisa, S.I.P., M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11.	Darwis, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat



12.	Taufiq Hidayatullah, S.E.	TSP Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat
13.	Sri Dwastari	TSP Pengadministrasian Perkantoran	Sekretariat

Untuk : Melaksanakan Tugas Menyusun Laporan Kinerja Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024.

Jakarta, 06 Januari 2025
Kepala Biro Hukum dan
Pengaduan Masyarakat,

Endang Suryastuti, S.H., M.Si.

